

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) diubah menjadi Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). BPJS Ketenagakerjaan merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk melindungi seluruh pekerja Indonesia dari berbagai bentuk risiko melalui penggunaan mekanisme jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan menyediakan beberapa jenis program jaminan sosial, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Menurut BPJS Ketenagakerjaan, program jaminan sosial itu sendiri wajib membayar iuran bulanan. Iuran bulanan dipotong dari gaji bulanan karyawan, atau dapat dilakukan secara mandiri, dapat dilakukan dengan transfer atau langsung ke kantor BPJS ketenagakerjaan terdekat. Setiap perusahaan yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan mayoritas mempunyai piutang. BPJS Ketenagakerjaan sendiri mempunyai indikator umur piutang yaitu :

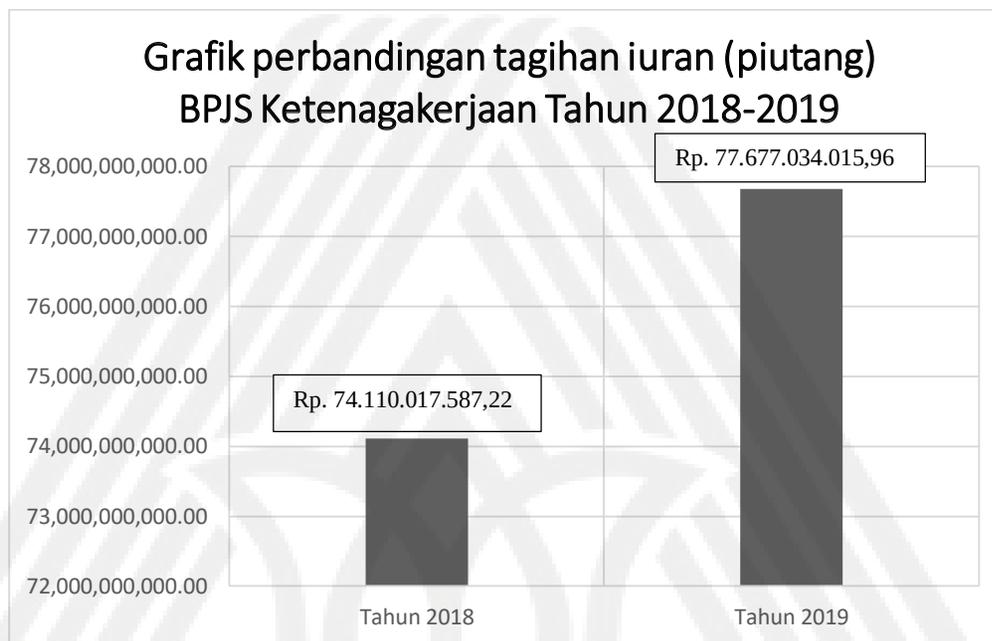
1. Apabila menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan 1-3 bulan maka perusahaan yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan tersebut masih dapat dikategorikan lancar.
2. Apabila menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan 4-6 bulan maka perusahaan yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan tersebut dapat dikategorikan kurang lancar.

3. Apabila menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan 7-12 bulan maka perusahaan yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan tersebut dapat dikategorikan diragukan.
4. Apabila menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan lebih dari 12 bulan maka perusahaan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan tersebut dapat dikategorikan macet.

Adanya indikator piutang BPJS ketenagakerjaan tersebut maka, banyak perusahaan-perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan yang macet membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan yang total pembayaran yang harus dibayar hingga ratusan juta rupiah bahkan terdapat pula perusahaan yang menunggak hingga mencapai milyaran. Di Indonesia, total tunggakan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2015 mencapai sekitar kurang lebih Rp. 5,74 Trilyun (Djumena, 2015). Di Bandung sendiri pada tahun 2015 perusahaan yang menunggak iuran BPJS ketenagakerjaan totalnya hingga mencapai kurang lebih Rp. 36 Milyar (Djumena, 2015). Tunggakan iuran tersenut menimbulkan tagihan iurang (piutang) untuk BPJS Ketenagakerjaan.

IKOPIN

Grafik 1. 1 Perbandingan tagihan iuran (piutang) BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Lodaya Bandung



Sumber: Laporan tagihan iuran penerima upah tahun 2018-2019 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lodaya Bandung.

Dari grafik diatas bisa dilihat dengan jelas bahwa tagihan iuran (piutang) dari tahun 2018 ke tahun 2019 meningkat dengan selisih Rp. 3.567.016.428,7. Karena tagihan iuran (piutang) tersebut maka terdapat kendala yaitu adanya keterlambatan dalam pembayaran iuran yang dilakukan oleh para pemberi kerja atau perusahaan dan perorangan sehingga BPJS Ketenagakerjaan cabang Lodaya meningkat. Sehingga perlu adanya kaji ulang untuk masalah pengendalian internal dan sistem akuntansi atas piutang. Data laporan tagihan iuran penerima upah tersebut hanya ada 2 tahun terakhir di karenakan di BPJS Ketenagakerjaan cabang Lodaya pada tahun 2018 terjadi peralihan sistem infrormasi.

Di laporan iuran tagihan (piutang) BPJS Ketenagakerjaan cabang Lodaya terdapat 321 yang dikategorikan sebagai perusahaan yang macet membayar iuran. Piutang timbul karena perusahaan tidak menyetorkan iuran para pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan meskipun telah dipotong dari gaji para pekerja.

Guna meminimalisir piutang internal perusahaan, maka perlu dilakukan pengendalian internal yang tepat dan senantiasa memperbaruinya untuk mendukung operasional sehari-hari guna memperoleh informasi yang cepat, akurat dan akurat. Pengendalian internal juga berguna untuk mencegah atau melindungi risiko yang dapat merugikan perusahaan (seperti penipuan) dan kesalahan yang disengaja (seperti memanipulasi data) atau tidak sengaja (seperti salah memasukkan angka). Pengendalian internal yang memadai akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan untuk mendukung seluruh aktivitas operasinya. Pada dasarnya aktivitas operasi dalam suatu perusahaan saling berkaitan, dan aktivitas tersebut dapat mendukung aktivitas lainnya. Dengan cara ini, sistem pengendalian akan mengurangi risiko yang terkait dengan sistem akuntansi piutang.

Pengendalian internal adalah suatu siklus, karena menembus ke dalam aktivitas bisnis organisasi, dan aktivitas bisnis merupakan bagian dari aktivitas manajemen dasar. Pengendalian internal mengklaim bahwa meskipun deskripsi dan tingkat operasi pengendalian internal hanya dapat memberikan jaminan umum, bahkan citra dan struktur pengendalian internal tidak dapat sepenuhnya dan efektif mencapai tujuannya. Meskipun pengendalian internal telah dirancang, keberhasilan bergantung pada persaingan dan pembatasan yang diberlakukan, sehingga tidak

dapat dibedakan. Piutang adalah likuiditas, dan piutang adalah piutang tunai yang ditentukan oleh waktu.

Jaman semakin maju, dan teknologi semakin rumit. Dengan kemajuan teknologi ini, semua tugas menjadi lebih mudah. Dengan kemajuan teknologi, Badan Usaha Milik Negara, Swasta, Perusahaan Dagang, dan Perusahaan Jasa harus dapat menindaklanjuti dan menjadi sangat diperlukan untuk perkembangannya.

Dengan perkembangan teknologi yang terus menerus, perusahaan membutuhkan suatu sistem informasi akuntansi yang dapat mengelola informasi secara cepat, tepat dan akurat untuk menunjang kegiatan guna memastikan perkembangan perusahaan yang berkelanjutan. Di dalam perusahaan tentunya banyak sekali informasi yang perlu dimasukkan dalam bentuk data, dan selalu diupdate setiap hari. Manajemen perusahaan menggunakan informasi ini untuk pengambilan keputusan dan strategi yang akan dijalankan. Dengan cara ini, perusahaan akan mencapai status operasi terbaik dalam hal informasi manajemen. Oleh karena itu, pengendalian internal memerlukan dukungan sistem informasi akuntansi yang baik agar proses pengelolaan informasi dapat diselesaikan dengan cepat dan kesalahan perhitungan akuntansi dapat diminimalisir.

Dilihat dari permasalahan mengenai tunggakan iuran (piutang) BPJS Ketenagakerjaan tersebut di atas, maka dalam rangka meminimalisasi piutang pada kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Lodaya, maka perlu diterapkan sistem informasi akuntansi yang ada dalam pengendalian intern. Analisis yang lebih tepat. Jika sistem pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi lebih akurat

maka piutang dapat diminimalkan sehingga dapat melindungi aset dengan lebih baik.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka akan dilakukan penelitian dengan judul: “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Piutang Untuk Meminimalisir Tagihan Piutang pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Lodaya”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka pokok permasalahannya yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Piutang yang digunakan di BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Lodaya
2. Bagaimana peran Sistem Pengendalian Internal yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Lodaya
3. Upaya apa saja yang harus dilakukan BPJS Ketenagakerjaan cabang Lodaya untuk meminimalisir piutang sehingga aset dapat terlindungi.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah diatas penelitian bermaksud untuk mengumpulkan data dan menggali informasi mengenai sistem informasi akuntansi piutang untuk meminimalisir piutang di BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Lodaya.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mendeskripsikan Sistem Informasi Akuntansi Piutang yang digunakan di BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Lodaya
2. Untuk mendeskripsikan Sistem Pengendalian Internal yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Lodaya.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Lodaya untuk meminimalisir piutang.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya akuntansi keuangan mengenai sistem pengendalian internal terhadap sistem informasi akuntansi atas piutang.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Para pegawai BPJS Ketenagakerjaan cabang Lodaya, sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan aktivitas usaha dan sistem manajemennya sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang.
2. Peneliti lainnya, adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Lodaya lokasi nya berada di Jl. Lodaya No.42 S , Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung Jawa Barat 40262.

1.5.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

1. Magang

Magang ini mulai dilakukan pada tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan 10 April 2020.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data mulai dilakukan pada minggu kedua pada saat magang yaitu mulai dari tanggal 17 Februari sampai dengan 10 April 2020.

3. Pengolahan Data dan Menyusun Usulan Penelitian

Pengolahan data ini dilakukan mulai pada saat 24 Februari sampai dengan 27 April 2020.

4. Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini akan dilakukan di bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020.